

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AL Hartani. 2011. Manajemen Pendidikan. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media. Bandung
- Fernando M Manulang. 2007. Hukum Dalam Kepastian. Prakarsa. Bandung.
- Frisca Wulandari. 2017. Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang. UNTIRTA. Serang Banten.
- Hani Handoko. 1999. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT Rafika Aditam.
- Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta.
- Herabuin. 2009. Adminstrasi Dan Supervisi Pendidikan. Pustaka Setia. Jakarta.
- Kusumaadmaja. Mochtar. 2000. Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung. Bina Cipta
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama.
- M. Manulang. 1997. *Dasar-Dasar Mariajement*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Saiful Anwar. 2004. Sendi-sendi Administrasi Negara. Glora Madani Press. Medan.
- Sofyan Syafri Harahap. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta.

- Soekarno K. 1968. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit Miswar. Jakarta.
- Sri Hartanti. Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudarajat. 2008. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Victor M. Situmorang. Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per /87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan walikota tanjungpinang No 56 tahun 2015 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah kota tanjungpinang.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

C. Jurnal

Anita AR. Moch. Ardi. Galuh Praharafi Rizqia. 2019. *Kajian hukum Terhadap Penggunaan kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas Di Kabupaten Penajam Paser Utara*. UNIBA Law Review. Volume 1 Nomor 1.

Emi Yurisdia. 2019. *Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Selatan*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.

Jun Hasanti 2015. *Pembatasan Bensin Premium Bagi Kendaraan Dinas Kasus Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Muhammad Andi Yhuniar. 2016. *Pelaksanaan Tugas dan wewenang inspektorat daerah Dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten semarang*. Diponegoro Law Journal. Volume 5. Nomor 4.

Novy Holiansyah Putri. 2019. *Penggunaan Mobil Dinas Oleh Pegawai Negeri Sipil*. Universitas Sriwijaya Indralaya. Palembang.

Rahmat Darmawan. 2018. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara*. Universitas Sumatra Utara.

D. Internet

<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

(<http://lintaskepri.com/dihari-libur-kendaraan-dinas-pemko-tanjungpinang-ini-digunakan-untuk-angkut-barang-.html>)